

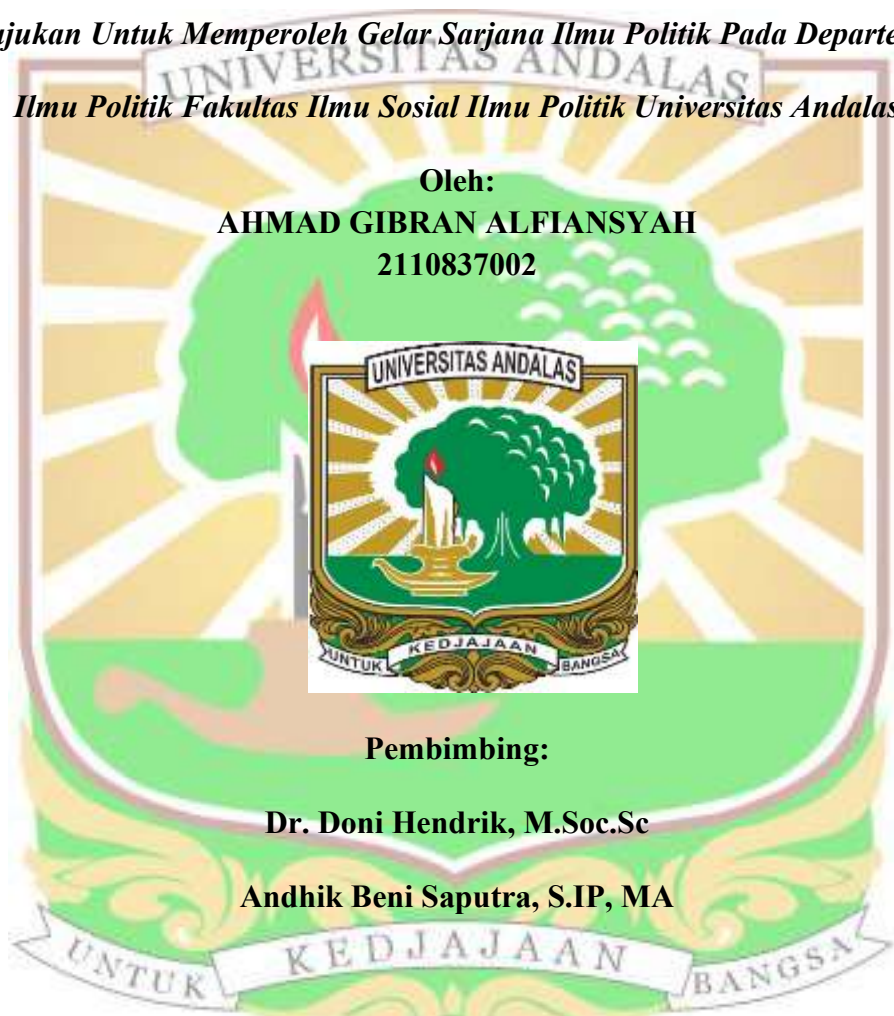
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA PADANG  
TAHUN 2022**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Departemen  
Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas*

**Oleh:**

**AHMAD GIBRAN ALFIANSYAH  
2110837002**



**Pembimbing:**

**Dr. Doni Hendrik, M.Soc.Sc**

**Andhik Beni Saputra, S.IP, MA**

**DEPARTEMEN ILMU POLITIK**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2026**

## ABSTRAK

Implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah daerah dalam upaya optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun memiliki potensi besar, pelaksanaan kebijakan ini di lapangan seringkali dihadapkan pada berbagai dinamika dan hambatan kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos di Kota Padang dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini menekankan pada empat variabel determinan keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggambarkan fenomena secara faktual. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam serta studi dokumentasi terhadap berbagai pemangku kepentingan, mulai dari aparatur Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), perangkat kelurahan, hingga pemilik rumah kos sebagai wajib pajak, serta diperkuat oleh informan triangulasi untuk validitas data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak rumah kos di Kota Padang belum berjalan secara optimal. Dari aspek komunikasi, ditemukan bahwa sosialisasi kebijakan masih belum merata dan belum menjangkau seluruh lapisan wajib pajak. Selain itu, aspek disposisi pelaksana dan struktur birokrasi ditemukan masih lemah, terutama dalam hal komitmen, koordinasi lintas sektor, serta intensitas pengawasan di lapangan. Kondisi-kondisi tersebut secara akumulatif berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak serta tidak tercapainya target penerimaan pajak rumah kos secara maksimal di Kota Padang. Diperlukan penguatan pada sistem pengawasan dan integrasi data agar kebijakan ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan, Pemungutan Pajak, Rumah Kos



## **ABSTRACT**

*The implementation of boarding house tax collection policies is one of the strategic instruments used by local governments to optimize Regional Original Revenue (PAD). Despite its significant potential, the field implementation of this policy often faces complex dynamics and obstacles. This study aims to analyze in depth the implementation of boarding house tax collection policies in Padang City using George C. Edward III's policy implementation framework. This theory emphasizes four determinant variables for successful implementation: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research employs a qualitative approach with a descriptive method to illustrate the phenomenon factually. Primary and secondary data were collected through in-depth interviews and documentation studies involving various stakeholders, ranging from the Regional Revenue Agency (Bapenda) officials and sub-district (Kelurahan) staff to boarding house owners as taxpayers, further strengthened by triangulation informants for data validity. The results indicate that the implementation of the boarding house tax collection policy in Padang City has not yet operated optimally. Regarding the communication aspect, it was found that policy socialization remains uneven and has not reached all levels of taxpayers. Furthermore, the disposition of implementers and the bureaucratic structure were found to be weak, particularly in terms of commitment, cross-sector coordination, and the intensity of field supervision. These conditions cumulatively result in low taxpayer compliance and the failure to achieve maximum boarding house tax revenue targets in Padang City. Strengthening the supervision system and data integration is required to enable this policy to contribute more significantly to regional development.*

**Keywords:** Policy Implementation, Tax Collection, Boarding House

